

BAB 2

Eksodus Pengungsi Rohingya dan Kebijakan Pemerintah Bangladesh

Pada bab ini penulis mencoba menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan erat dengan subyek dan obyek penelitian ini seperti sejarah masuknya gelombang pengungsi Rohingya ke Bangladesh, kemudian gambaran kondisi pengungsi dan kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh. Selain itu, penulis juga menjelaskan bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bangladesh dalam menangani pengungsi Rohingya yang terus masuk ke wilayahnya.

2.1. Gelombang Eksodus Rohingya ke Bangladesh

Sejarah konflik yang terjadi antara Rohingya dengan Pemerintah Myanmar sebenarnya dapat dilihat mulai dari masa kolonial ketika Myanmar masih dikuasai oleh Inggris. Menurut *The Conversation* (2017), di masa kolonial Inggris meminta dukungan dari buruh-buruh migran, salah satunya Rohingya, untuk meningkatkan produksi beras dalam upaya mendapatkan profit yang besar. Kemudian masuklah orang-orang Rohingya dalam jumlah besar ke Myanmar di abad 17 sebagai bagian dari kebijakan Inggris saat itu. Pemerintah kolonial Inggris menjanjikan Rohingya akan mendapatkan sebuah wilayah bernama “Muslim National Area”, sebagai bentuk imbalan atas bantuan yang diberikan oleh Rohingya (*The Conversation*, 2017).

Kemudian, seperti layaknya taktik yang dilakukan oleh penjajah lainnya, Pemerintah Inggris tidak memberikan wilayah yang telah dijanjikan kepada Rohingya (*The Conversation*, 2017). Hingga ketika Myanmar merdeka dari Inggris pun Rohingya tidak pernah mendapatkan wilayah tersebut. Dengan situasi bahwa Rohingya sebenarnya memang

bukan etnis asli di Myanmar, maka Pemerintah Myanmar pun tidak mengakui status kewarganegaraan dari Rohingya, dan menyebut mereka sebagai orang asing (The Conversation, 2017). Namun, Rohingya tetap menagih janji mengenai pemberian wilayah kepada Pemerintah Myanmar.

Pada tahun 1950, Rohingya melakukan pemberontakan terhadap kebijakan Pemerintah Myanmar. Rohingya meminta adanya pengakuan kewarganegaraan dari Myanmar dan juga pemberian sebuah wilayah yang dijanjikan oleh Inggris di masa penjajahan (The Conversation, 2017). Pemerintah Myanmar pun melawannya dengan kekuatan militer. Kondisi semakin buruk dialami oleh Rohingya ketika terjadi kudeta militer terhadap pemerintahan yang sah pada tahun 1962. Dengan berkuasanya pemerintahan militer, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin tidak demokratis dan semakin mengabaikan hak asasi warga Rohingya.

Dengan kondisi masyarakat dan Pemerintah Myanmar yang semakin diskriminatif terhadap warga Rohingya, dalam beberapa gelombang eksodus pun mulai terjadi di mana warga Rohingya mencoba mencari kehidupan yang lebih baik dengan pergi ke negara lain di sekitar Myanmar. Setidaknya terdapat 4 gelombang eksodus warga Rohingya ke negara-negara terdekat seperti Bangladesh, India, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan beberapa negara lain. Gelombang eksodus ini terbagi berdasarkan tahun pecahnya konflik antara warga Rohingya dengan pemerintahan militer Myanmar.

Gelombang pertama terjadi pada tahun 1978, ketika militer Myanmar melakukan *Operasi Nagamin* yaitu operasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi warga negara Myanmar dan warga negara asing, di mana warga Rohingya tidak terdata sebagai warga negara Myanmar (Bepler, 2018, hlm. 6). Akibatnya, terjadi persekusi yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap warga Rohingya. Sekitar 220.000 warga Rohingya

harus meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh sebagai negara yang paling terjangkau untuk menghindari persekusi yang terus berlangsung.

Gelombang kedua terjadi sekitar tahun 1991 dan 1992, di mana diperkirakan 250.000 warga Rohingya terpaksa meninggalkan Myanmar (Bepler, 2018, hlm. 6). Gelombang eksodus ini dipicu oleh kembali meningkatnya diskriminasi dan persekusi yang sistematis yang dilakukan oleh militer dan juga kelompok Budha nasionalis Myanmar (Neranja & Shetty, 2019, hlm. 5). Diskriminasi dan persekusi yang dialami oleh warga Rohingya pada awalnya didorong oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Myanmar, terutama melalui militernya, yang bertindak represif terhadap warga Rohingya. Namun kemudian diskriminasi dan persekusi yang didominasi oleh sentimen rasis dan agama, semakin melebar di kalangan masyarakat Myanmar yang mayoritas beragama Budha (Neranja & Shetty, 2019, hlm. 5). Alhasil, tindakan kekerasan terhadap warga Rohingya semakin tumbuh subur di Myanmar.

Meskipun sejak tahun 2011 Myanmar mengalami revolusi politik dengan berakhirnya era junta militer, namun kondisi Rohingya di Myanmar justru kembali memburuk di tahun 2012. Para ultra-nasionalis dan biksu Budha radikal mendorong pemerintah untuk mengeluarkan aturan perlindungan ras dan agama yang tujuannya sebenarnya hanya untuk mempersekusi warga Muslim Rohingya (Bepler, 2018, hlm. 7). Di tahun 2012 tersebut, pecahlah konflik antara warga Rohingya dengan kelompok nasionalis-radikal. Hasilnya, ratusan ribu warga Rohingya harus kembali mengungsi demi menyelamatkan diri. Di tahun inilah bisa disebut gelombang eksodus Rohingya yang ketiga.

Yang terakhir, di tahun 2017 lalu terjadi gelombang eksodus keempat setelah kembali pecahnya konflik antara militan Rohingya dengan militer Myanmar. Salah satu kelompok militan yang ada di dalam komunitas warga Rohingya, yaitu Arakan Rohingya Salvation Army

(ARSA) melakukan penyerangan ke pos polisi yang menewaskan sembilan petugas perbatasan dan empat tentara (Neranja & Shetty, 2019, hlm. 6). Militer Myanmar merespons penyerangan ini dengan mengambil langkah keras dengan melakukan represi besar-besaran terhadap warga Rohingya. Dampaknya, sekitar 730.000 warga Rohingya melarikan diri menuju Bangladesh (Human Rights Watch, 2019a). Gelombang keempat ini menjadi gelombang eksodus terbesar dibandingkan gelombang sebelumnya.

2.1.1 Persebaran Pengungsi Rohingya di Seluruh Dunia

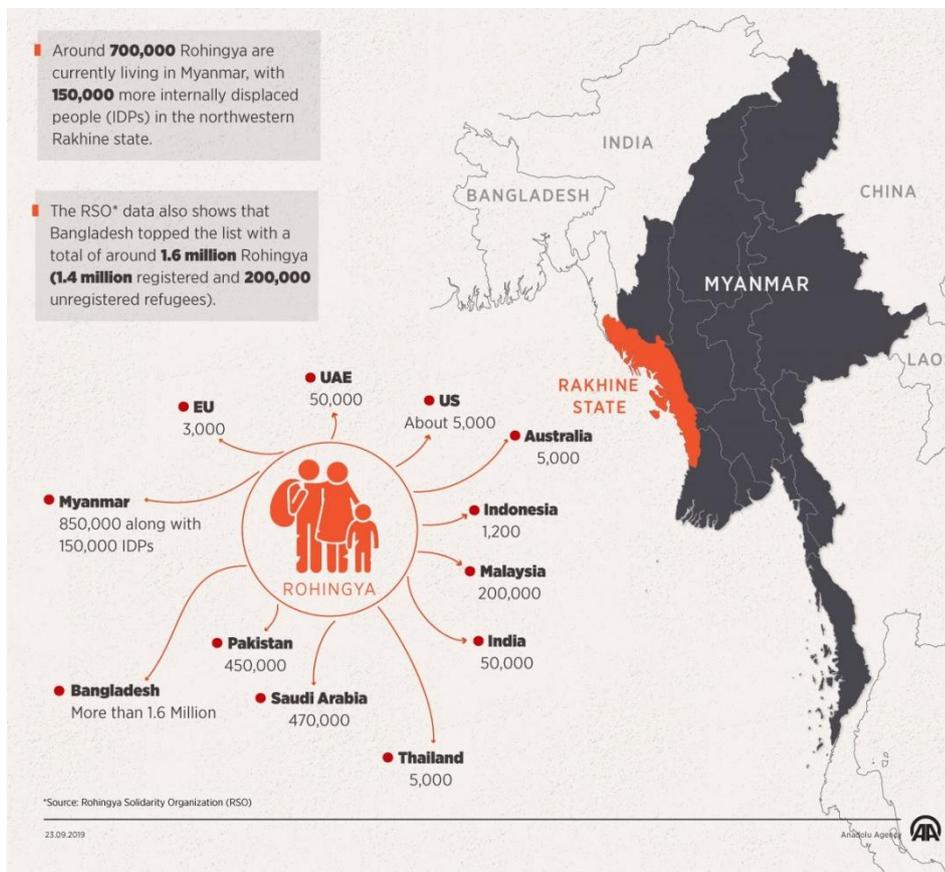
Dalam perkembangannya, eksodus yang dilakukan oleh warga Rohingya sejak tahun 1978 menasar sejumlah negara untuk dijadikan destinasi dalam upaya mendapatkan kondisi yang lebih baik. Menurut Anadolu Agency (2019), sejak eksodus gelombang pertama yang terjadi pada 1978 hingga tahun 2019, jumlah warga Rohingya yang melarikan diri ke negara lain berjumlah sekitar 2,5 juta orang. Jutaan warga Rohingya ini melakukan eksodus ke beberapa negara seperti Bangladesh, Malaysia, Indonesia, dan lain-lain. Menurut Anadolu Agency (2019), sulit untuk mendapatkan jumlah pasti berapa warga Rohingya yang masih berada di Myanmar karena tidak adanya status kewarganegaraan dari Rohingya, sehingga identifikasi sulit dilakukan. Bahkan, jumlah pasti warga Rohingya yang melakukan eksodus pun sulit diketahui secara pasti karena tidak semua warga Rohingya masuk ke negara lain melalui registrasi secara resmi.

Berdasarkan data yang diperoleh Anadolu Agency (2019) dari RSO, terdapat beberapa negara yang paling banyak menampung pengungsi Rohingya, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bangladesh: 1,6 juta (sekitar 1,4 juta yang tercatat secara resmi)
- b. Arab Saudi: 470.000
- c. Pakistan: 450.000

- d. Malaysia: 200.000
- e. India: 50.000
- f. UEA: 50.000
- g. Thailand: 5.000
- h. Australia: 5.000
- i. Amerika Serikat: 5.000
- j. Uni Eropa: 3.000
- k. Jordan: 1.300
- l. Indonesia: 1.200
- m. Kanada: 1.100
- n. Nepal: 800
- o. Sri Lanka: 650
- p. Jepang: 56

Gambar 1. Bangladesh sebagai Host Country Terbesar



Sumber: Anadolu Agency (2019)

Berdasarkan data di Gambar 2. di atas, dapat dilihat bahwa Bangladesh merupakan negara yang paling banyak menampung pengungsi Rohingya dibandingkan negara lain di seluruh dunia. Sejak pertama kali eksodus dilakukan oleh warga Rohingya, Bangladesh telah menerima lebih dari satu juta warga Rohingya di wilayah mereka. Salah satu alasan paling logis bagi warga Rohingya untuk melarikan diri menuju Bangladesh adalah karena jarak perbatasan Bangladesh yang paling dekat dengan Rakhine, wilayah yang menjadi domisili warga Rohingya.

Ketika konflik Rohingya pecah dan ratusan ribu warga Rohingya melarikan diri menuju Bangladesh, hubungan diplomatik antara Bangladesh dan Myanmar memanas. Meskipun begitu, Pemerintah Bangladesh pada akhirnya dengan terbuka menyambut kedatangan para pengungsi tersebut. Pemerintah Bangladesh pada saat itu memberikan akomodasi penuh kepada pengungsi Rohingya seperti menyediakan pakaian, obat-obatan, dan makanan (Gunawan, 2020). Selain itu, Pemerintah Bangladesh juga mendirikan tenda-tenda pengungsian di Cox's Bazar yang akhirnya menjadi kamp pengungsian terbesar di dunia.

Gambar 2. Posisi Geografis Rakhine terhadap Bangladesh



Sumber: Norwegian Refugee Council (2019)

Kedatangan ratusan ribu bahkan jutaan warga Rohingya dari Myanmar tentu saja memberikan konsekuensi yang besar terhadap Bangladesh. Sebagai negara penampung atau *host country*, Bangladesh memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat mengakomodir kebutuhan pengungsi beserta perlindungan terhadap hak mereka. Tentu saja tanggung jawab ini tidak mudah untuk dipenuhi karena beberapa faktor utama seperti kemampuan pemerintah untuk menanggung kebutuhan ratusan ribu pengungsi, dan juga karena Bangladesh tidak memiliki instrumen hukum bagi perlindungan pengungsi.

2.2. Konsekuensi Bangladesh sebagai *Host Country*

2.2.1. Cox's Bazar sebagai Kamp Pengungsian Terbesar Dunia

Salah satu konsekuensi utama yang paling dirasakan oleh Pemerintah Bangladesh maupun masyarakatnya dari eksodus pengungsi

Rohingya adalah hadirnya hampir satu juta orang pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Sebuah distrik bernama Cox's Bazar saat ini menjadi tempat penampungan pengungsi terbesar di dunia, di mana sekitar 900.000 pengungsi Rohingya berada di distrik tersebut. Distrik ini terletak di bagian selatan Bangladesh yang langsung berbatasan dengan Myanmar. Kamp pengungsian Rohingya terpusat di dua kota yaitu, Ukhiya dan Teknaf Upazilas. Dua kota ini telah menjadi tujuan utama warga Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar sejak konflik 1978 terjadi. Sebagian besar wilayah di Cox's Bazar pada awalnya masih berupa hutan dan bukit-bukit. Namun setelah pengungsi Rohingya masuk, Cox's Bazar menjadi semakin terbuka dan lebih dapat ditinggali oleh para pengungsi.

Pemerintah Bangladesh bersama dengan komunitas lokal bekerja sama membantu pengungsi Rohingya dalam mendirikan tenda-tenda pengungsian. Selain juga terdapat peran dari UNHCR yang memberikan peralatan konstruksi bagi para pengungsi untuk membangun tenda mereka sendiri (Bloomberg CityLab, 2019). UNHCR dan organisasi kemanusiaan lain juga memberikan bantuan berupa bahan bakar gas yang digunakan untuk memasak dan penerangan, selain juga pendirian sistem pembuangan kotoran manusia di kamp pengungsian (Bloomberg CityLab, 2019). Dalam laporannya, Bloomberg CityLab (2019) mendeskripsikan bahwa sebuah kamp pengungsian benar-benar berubah menjadi seperti sebuah kota. Dari yang awalnya hanya merupakan daerah berupa hutan dan perbukitan, berubah menjadi sebuah daerah dengan tenda-tenda dan berbagai infrastruktur yang tersedia.

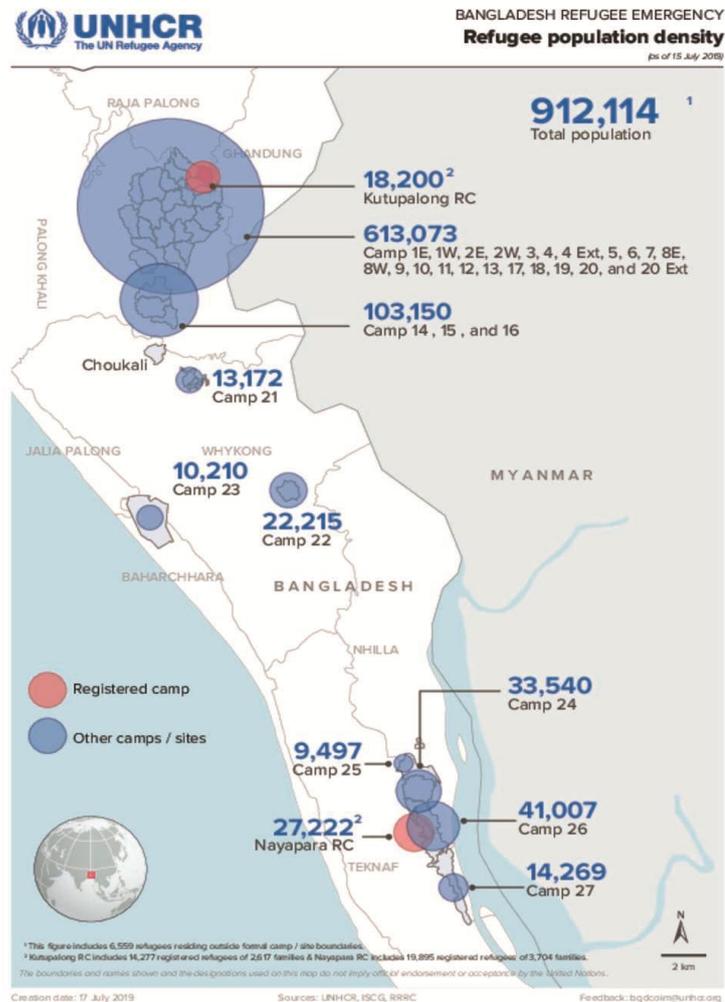
Gambar 3. Kondisi Kamp Pengungsian di Cox's Bazar



Sumber: UNHCR (2019)

Meskipun kondisi kamp pengungsian cukup lebih baik dengan semakin mudahnya para pengungsi untuk mendapatkan akses transportasi, akses pembuangan limbah, akses bahan bakar, ataupun akses kebutuhan lainnya, namun kondisi kamp pengungsian masih sangat rawan terhadap ancaman fenomena alam. Kamp pengungsian yang dihuni oleh warga Rohingya berada di daerah yang sangat rawan ketika memasuki musim penghujan yang dimulai sejak bulan Mei. Ketika memasuki musim penghujan, kamp pengungsian sering kali dilanda badai yang mendorong terjadinya banjir dan tanah longsor. Sehingga ketika musim hujan datang, para pengungsi dipersenjatai peralatan untuk menahan tenda mereka agar tidak rubuh terkena angin kencang (Bloomberg CityLab, 2019).

Gambar 4. Populasi Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar



Sumber: UNHCR (2019)

Di Cox's Bazar, terdapat puluhan kamp pengungsian yang dihuni oleh ratusan ribu pengungsi Rohingya. Di antara puluhan kamp tersebut, kamp pengungsian di Kutupalong menjadi yang terbesar dengan jumlah pengungsi lebih dari 600.000 orang (Norwegian Refugee Council, 2019). Tidak semua kamp pengungsian yang ada di Cox's Bazar merupakan kamp yang legal atau terdaftar di catatan Pemerintah Bangladesh. Dari puluhan kamp yang ada, tercatat hanya 2 kamp yang telah terdaftar yaitu di Kutupalong dan Nayapara (UNHCR, 2019). Kondisi ini cukup menyulitkan otoritas untuk mencatat populasi pasti dari pengungsi

Rohingya di Bangladesh. Dengan sulitnya pendataan yang akurat terhadap pengungsi Rohingya, otoritas pun juga dibuat kesulitan dalam melakukan penanganan masalah-masalah yang terjadi di kamp pengungsian ataupun masalah yang terjadi di luar kamp pengungsian yang juga dilakukan oleh pengungsi Rohingya, seperti misalnya permasalahan perdagangan narkoba ataupun penyebaran paham ekstrem.

2.2.2. Permasalahan Sosial dan Keamanan

Pemerintah Bangladesh sebagai *host country* tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang harus diberikan kepada pengungsi Rohingya untuk memberikan perlindungan dan akomodasi kehidupan para pengungsi selama di Bangladesh. Namun, Pemerintah Bangladesh juga dihadapkan pada sejumlah persoalan yang ada atau ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya. Sebagai sebuah kelompok yang hidup dalam ketidakpastian dan penuh kekerasan, pengungsi Rohingya sangat rentan menjadi sasaran pihak-pihak yang ingin memanfaatkan para pengungsi untuk melancarkan kegiatan ilegal mereka, misalnya perdagangan narkoba dan penyebaran ekstremisme.

Yang pertama adalah tingginya perdagangan “Yaba” di Bangladesh. Yaba merupakan salah satu jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi di Bangladesh. Yaba sendiri adalah sebutan lokal untuk jenis narkoba yang merupakan untuk campuran antara methamphetamine dan kafein. Di saat jenis narkoba lain seperti heroin dan phensedyl jumlah penggunaannya menurun, jumlah penggunaan Yaba di Bangladesh justru meroket dalam satu dekade terakhir sejak tahun 2008 (Anjum, 2020, hlm. 14). Dan dalam beberapa waktu terakhir, Pemerintah Bangladesh di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sheikh Hasina melakukan perang besar-besaran terhadap perdagangan Yaba dan jenis narkoba lainnya di Bangladesh.

Dalam perkembangannya, Bangladesh menjadi salah satu titik penting dalam perdagangan narkoba, utamanya Yaba, di regional Asia Selatan. Bangladesh digunakan oleh para penyelundup sebagai tempat transit sebelum diedarkan ke negara-negara lain. Yaba ini banyak diproduksi di Myanmar, di mana ditemukan sekitar 49 pabrik Yaba pada tahun 2018 (Anjum, 2020, hlm. 15). Bangladesh menjadi jalur yang strategis bagi perdagangan narkoba, di mana Bangladesh merupakan daerah transit bagi produsen narkoba yang berasal dari “Golden Triangle” dan “Golden Crescent”. Golden Triangle adalah sebutan bagi tiga negara produsen narkoba di Asia Tenggara yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar. Sementara Golden Crescent merujuk pada tiga negara produsen opium yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan.

Gambar 5. Peta Perdagangan Yaba



Sumber: Dhaka Tribune (2019)

Pemerintah Bangladesh melakukan perang terhadap perdagangan narkoba karena para pedagang sering kali menjadikan Teknaf, salah satu kota di Cox's Bazar, sebagai salah satu rute perdagangan mereka (Anjum, 2020, hlm. 15). Jalur ini dipilih karena rute ini lebih murah dibandingkan rute lain, akses transportasi yang mudah, dan tingginya urbanisasi di wilayah tersebut (Anjum, 2020, hlm. 15). Perdagangan narkoba yang terjadi semakin mengancam keamanan nasional Bangladesh karena para pedagang ini memanfaatkan pengungsi Rohingya sebagai kurir mereka.

Dengan banyaknya warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh menuju kamp pengungsian terbesar di Cox's Bazar, pedagang narkoba melihat bahwa para pengungsi ini dapat dimanfaatkan sebagai kamufase. Dhaka Tribune (2019) melaporkan bahwa Whaikhyang, salah satu jalur masuk yang digunakan oleh pengungsi Rohingya ketika eksodus tahun 2017 terjadi, merupakan jalur baru bagi perdagangan Yaba di Bangladesh. Otoritas Bangladesh menangkap sekitar 500 pengungsi Rohingya yang menyelundupkan Yaba ketika mereka masuk ke Bangladesh di masa eksodus pada tahun 2017 (Anjum, 2020, hlm. 15).

Semakin tingginya perdagangan Yaba di Bangladesh membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina semakin memperketat keamanan di jalur-jalur yang digunakan oleh para pedagang Yaba, terutama di wilayah di mana pengungsi Rohingya melakukan mobilitasnya. Untuk menjaga keamanan nasional, Pemerintah Bangladesh juga tidak akan lagi mengampuni para pedagang yang tertangkap. Dalam beberapa waktu terakhir Pemerintah Bangladesh juga semakin meningkatkan ketegasannya melalui penggunaan pendekatan yang keras dalam setiap kejahatan yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya demi mencegah keterlibatan para pengungsi dalam tindakan-tindakan yang mengancam keamanan nasional Bangladesh.

Permasalahan lain yang harus diwaspadai oleh Pemerintah Bangladesh dari keberadaan pengungsi Rohingya adalah penyebaran paham ekstremisme. Seperti yang diketahui bahwa etnis Rohingya dengan latar belakang agama Islam adalah kelompok etnis yang sering mendapatkan diskriminasi dan persekusi dari kelompok mayoritas Budha di Myanmar. Hal ini kemudian membuat Rohingya memiliki semangat perlawanan terhadap berbagai permasalahan yang mereka alami selama ini, maka muncullah gerakan-gerakan militan di dalam kelompok etnis Rohingya.

Pada sekitar tahun 1980an, berdiri sebuah organisasi bernama Rohingya Solidarity Organization (RSO). RSO ini adalah pecahan dari Rohingya Patriotic Front, yang merupakan organisasi politik pertama kali didirikan oleh Rohingya. RSO ini dalam waktu yang singkat menjadi sebuah kelompok yang paling militan dari kelompok-kelompok miilitan Rohingya lainnya di Bangladesh dan perbatasan (Lintner, t.t., hlm. 426). Organisasi ini mendapatkan dukungan besar dari sejumlah organisasi yang sepemikiran lainnya seperti Jamaat-i-Islami di Bangladesh dan Pakistan, Islamic Youth Organization of Malaysia, dan beberapa organisasi lainnya. Markas utama RSO berada di sekitar rumah sakit yang dibangun oleh pendiri RSO di Teknaf, yang menjadi salah satu kamp pengungsian utama yang menampung pengungsi Rohingya (Lintner, t.t., hlm. 426). Selain Rohingya Solidarity Organization (RSO), di dalam kelompok etnis Rohingya juga berdiri organisasi bernama Arakan Rohingya National Organization (ARNO). Organisasi ini beroperasi di Cox's Bazar dan beberapa wilayah di Chittagong, Bangladesh. Tujuan dibuatnya organisasi ini adalah untuk menyatukan pecahan-pecahan dari seluruh kelompok ke dalam satu kelompok (Bashar, t.t., hlm. 32).

Pada tahun 2017, tanpa diketahui oleh banyak orang, muncul sebuah organisasi yang menamakan diri sebagai Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Organisasi ini pada awalnya menyatakan bahwa

mereka bukan kelompok teroris, melainkan kelompok yang ingin memperjuangkan hak warga Rohingya dari diskriminasi yang terjadi (Bashar, t.t., hlm. 34). Tetapi setelah tidak lama dari kemunculannya tersebut, pada 25 Agustus 2017 ARSA melakukan serangan terencana terhadap 30 pos polisi di Rakhine. Hal ini mengakibatkan 6.700 warga Rohingya tewas dan 700.000 lebih lainnya harus melarikan diri menuju Bangladesh (Bashar, t.t., hlm. 34).

Kehadiran hampir satu juta pengungsi Rohingya di Bangladesh tentu saja memberikan risiko-risiko yang tidak kecil mulai dari keamanan, ekonomi, sosial, hingga politik. Dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi yang semakin kompleks, Pemerintah Bangladesh pun mencoba meresponsnya dengan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya, mulai dari kebijakan pintu terbuka terhadap pengungsi hingga yang terakhir di tahun 2019 lalu Pemerintah Bangladesh memutuskan untuk menghentikan penerimaan pengungsi Rohingya di wilayahnya.

2.3. Kebijakan Pemerintah Bangladesh terhadap Pengungsi Rohingya

Eksodus yang dilakukan oleh warga Rohingya ke Bangladesh sebenarnya menimbulkan dilema besar bagi Pemerintah Bangladesh. Di satu sisi, Pemerintah Bangladesh harus menampung sekaligus mengakomodir kebutuhan ratusan ribu hingga jutaan warga Rohingya, di mana tentu saja Bangladesh sudah memiliki permasalahan dan kepentingan domestik yang tidak kalah besar. Namun di sisi lain, Bangladesh mau tidak mau harus menerima kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah mereka. Maka bukan hal mudah bagi Bangladesh untuk secara konsisten menjadi negara penampung bagi pengungsi Rohingya sejak 1978.

2.3.1. Kebijakan Pintu Terbuka Pemerintah Bangladesh

Dalam hal penanganan pengungsi Rohingya, Pemerintah Bangladesh melakukan evolusi atau perubahan dalam kebijakan dari yang pada awalnya sangat terbuka terhadap pengungsi hingga lebih tertutup dalam menerima kedatangan pengungsi. Di awal gelombang eksodus warga Rohingya, Pemerintah Bangladesh dengan terbuka menampung para pengungsi tersebut dengan menyediakan berbagai akomodasi untuk mencukupi kebutuhan mereka. Meskipun secara politik atau diplomatik, hubungan Bangladesh dan Myanmar memanas. Bahkan ketika gelombang eksodus kedua terjadi pada 1991/1992, Pemerintah Bangladesh membangun 20 kamp pengungsian sementara di Distrik Cox's Bazar untuk menampung ratusan ribu warga Rohingya yang kembali harus mengungsi ketika konflik terjadi (Ullah, 2011, hlm. 6).

Pemerintah Bangladesh pun tidak bekerja sendirian dalam menangani pengungsi Rohingya. Mereka dibantu oleh negara-negara lain, organisasi internasional, maupun *non-governmental organization* (NGO). Salah satu organisasi yang paling berperan dalam membantu Bangladesh dalam menangani pengungsi adalah UNHCR, di mana organisasi yang bernaung di bawah PBB ini membantu Bangladesh dalam koordinasi bantuan kemanusiaan dengan organisasi-organisasi lainnya, baik internasional maupun lokal (Gunawan, 2020, hlm. 6). Selain itu, UNHCR juga mengambil peran besar dalam setiap upaya repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar, di mana UNHCR menjadi perantara negosiasi antara Pemerintah Bangladesh dan Pemerintah Myanmar.

Upaya Bangladesh untuk bersikap terbuka dalam penanganan pengungsi ini cukup menarik untuk dilihat karena sebenarnya Bangladesh dalam sejarahnya tidak pernah menjadi negara yang berpartisipasi dalam konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai pengungsi, misalnya Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 (Gunawan, 2020, hlm.

19). Selain itu, Bangladesh juga bukan pihak yang terlibat dalam Statelessness Convention 1954 dan 1961. Jika dilihat dari hukum nasional, Bangladesh pun sebenarnya tidak memiliki sebuah aturan hukum yang langsung mengatur mengenai pengungsi. Meskipun begitu, Bangladesh tetap harus bertanggung jawab untuk menampung pengungsi Rohingya karena adanya sebuah prinsip dalam Konvensi Jenewa 1951 yaitu prinsip *non-refoulement*.

Prinsip *non-refoulement* adalah sebuah prinsip yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1951 yang mengatur tentang larangan bagi negara untuk mengembalikan atau menolak pengungsi dalam kondisi apapun menuju tempat di mana para pengungsi tersebut tidak mendapatkan kebebasannya dan mengancam keselamatannya. Prinsip *non-refoulement* ini terdapat dalam Pasal 33(1), yang menyatakan bahwa:

“No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his [or her] life or freedom would be threatened on account of his [or her] race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.”¹

Prinsip *non-refoulement* ini dapat dimaknai sebagai mandat yang diberikan kepada negara untuk bertanggung jawab dalam memberikan penampungan bagi setiap pengungsi dengan tujuan mencegah pengungsi tersebut tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, serta memberikan perlindungan dan kebebasan baginya. Pemaknaan prinsip *non-refoulement* inilah yang membuat Bangladesh selama ini bersedia menjadi *host country* bagi pengungsi Rohingya. Meskipun bukan sebagai peratifikasi Konvensi 1951, Bangladesh menghormati adanya prinsip *non-refoulement* ini dengan berlaku tidak semena-mena terhadap pengungsi Rohingya. Meskipun dalam perkembangannya Bangladesh juga menggunakan pendekatan yang cukup keras terhadap pengungsi Rohingya, namun Bangladesh tetap berupaya melaksanakan tanggung

¹ Refugee Convention 1951, Article 33(1). (UNHCR, t.t.)

jawabnya dalam memberikan penampungan dan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi Rohingya dengan bantuan dari berbagai pihak.

Ketika gelombang eksodus kembali terjadi tahun 2017 lalu, Pemerintah Bangladesh pun pada awalnya juga bersikap terbuka terhadap membanjirnya pengungsi Rohingya yang masuk ke Bangladesh. Bahkan seperti dikutip dari Dhaka Tribune (2017), Perdana Menteri Sheikh Hasina menyatakan: “We have the ability to feed 160 million people of Bangladesh and we have enough food security to feed the 700.000 refugees”. Pernyataan ini menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi dari Sheikh Hasina untuk menyambut kehadiran ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Namun, sikap terbuka ini dapat dikatakan tidak berlangsung lama atau hanya terjadi di awal gelombang eksodus tahun 2017 itu saja.

2.3.2. Penggunaan Pendekatan yang Keras terhadap Pengungsi Rohingya

Setelah menunjukkan sikap terbuka terhadap gelombang eksodus pengungsi Rohingya di awal pecahnya konflik tahun 2017, beberapa waktu kemudian Sheikh Hasina secara perlahan melakukan perubahan kebijakan dengan menerapkan pendekatan yang lebih keras terhadap pengungsi Rohingya di Cox's Bazar. Masuknya gelombang pengungsi yang mencapai 700.000 orang di tahun 2017 tersebut membuat timbulnya konsekuensi-konsekuensi yang cukup berat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Bangladesh, salah satunya yang paling nyata dirasakan adalah konsekuensi keamanan. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 2.2.2. tentang permasalahan sosial dan keamanan, bahwa terdapat dua isu utama yang harus dihadapi Pemerintah Bangladesh dalam sektor keamanan terkait dengan keberadaan pengungsi Rohingya di Cox's Bazar yaitu perdagangan narkoba dan penyebaran ekstremisme.

Dengan meningkatnya isu keamanan di kamp pengungsian, otoritas Bangladesh mengambil sejumlah langkah keamanan yang cukup keras

untuk mencegah meluasnya isu keamanan yang terjadi. Dikutip dari Reuters (2019), otoritas Bangladesh memerintahkan operator seluler untuk memblokir layanan internet di kamp pengungsian. Selain itu, operator seluler juga diminta untuk menarik dan dilarang memperjualbelikan kartu SIM kepada pengungsi Rohingya. Menurut otoritas keamanan di kamp pengungsian, langkah ini diambil untuk mencegah pengorganisasian kejahatan dan protes disertai kekerasan yang telah terjadi beberapa kali sebelumnya (Reuters, 2019).

Selain membatasi komunikasi para pengungsi Rohingya, otoritas keamanan Bangladesh juga membatasi ruang gerak dari para pengungsi untuk keluar masuk di kamp pengungsian. Otoritas Bangladesh mengambil langkah keamanan dengan memasang kawat berduri di sekeliling kamp pengungsian, sehingga mempermudah pengawasan arus keluar masuk orang di kamp sekaligus juga menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperdagangkan narkoba maupun menyebarkan paham ekstremnya (Human Rights Watch, 2019). Langkah keamanan ini dikritik keras oleh Human Rights Watch (2019) dengan menyatakan bahwa penerapan langkah keamanan yang keras yang dilakukan oleh otoritas Bangladesh telah mengabaikan Hak Asasi Manusia dari para pengungsi dan membuat situasi kamp pengungsian seperti layaknya penjara dengan udara terbuka.

Kemudian puncaknya adalah pada Maret 2019 lalu, ketika Pemerintah Bangladesh melalui Sekretaris Luar Negeri, Shahidul Haque, di forum Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa Bangladesh tidak akan lagi mengakomodasi kedatangan pengungsi Rohingya dari Myanmar (The Guardian, 2019). Keputusan ini membuat Bangladesh mendapatkan banyak kecaman dari organisasi dan aktivis HAM internasional. Dan keputusan inilah yang menjadi obyek utama dalam penelitian ini, di mana penulis mencoba menganalisis mengapa pada akhirnya Pemerintah Bangladesh menghentikan penerimaan pengungsi Rohingya, setelah di

awal Pemerintah Bangladesh memiliki sikap yang sangat terbuka terhadap eksodus pengungsi Rohingya dari Myanmar.